

NASIONALISME, DEMOKRATISASI, DAN SENTIMEN PRIMORDIAL DI INDONESIA: PROBLEMATIKA IDENTITAS KEAGAMAAN *VERSUS* KEINDONESIAAN (KASUS ORMAS PENDUKUNG *KHILAFAH ISLAMIAH*)*

Oleh: Syafuan Rozi

Abstract

This article is a desk-review or literature study about the raising of religious sentiment of political identity with various expressions related to some Islamic movements such as HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), Tarbiyah movement and MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) in Indonesia's post-Soeharto era. This kind of movements can be seen as a phenomenon of political movement and religious awareness as critical mass toward Indonesian nation-state or secular nationalism. The contestation of the meaning of "keindonesiaan" such as spirit of tolerance, equality and appreciation of pluralism, anti and pro-secular-liberalism, reducing poverty and increasing wealth and good-manners, in the face of searching for model or alternative of new form of the state which promoted by the Khilafah Islamiyah movement and supporters. This research elaborated issues such as how far religious values and khilafah principles implemented by various Islamic movements towards Khilafah Islamiyah states and how far it will make impact toward Indonesian nation-state at present and in the future. The general questions of this research namely: what are the basic and core-values of political thinking of this groups in order to convince the people that Khilafah Islamiyah is an alternative of the future state and how they implement their principles. What kind of strategic and step they take in order to prove that their vision will become reality or not. Finally, how big their ideas and their movement may counter the "keindonesiaan" principle, as best practice or alternative in political development.

Pengantar

Keberadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terdiri atas beragam gugus primordial merupakan suatu hal yang unik. Keragaman yang dimilikinya menyebabkan negara ini merupakan sebuah *unique experiences* yang tak akan pernah terulang dan mungkin hanya dapat dibandingkan dengan India. Dalam kapasitasnya tersebut, beragam persoalan tak pelak hadir di dalam negara multikultural ini. Salah satunya adalah fenomena kebangkitan sentimen identitas keagamaan yang mengarah pada upaya kecenderungan penguatan semangat eksklusif dan berorientasi mendangkalkan keunikan dan yang lebih penting dari itu, makna bangsa. Meski keberagaman merupakan salah satu elemen utama dari fondasi bangsa ini, namun kecenderungan yang mengarah ekslu-

sivisme, jelas berpotensi meluruhkan bangun keindonesiaan, yang mengisyaratkan adanya toleransi dan penghormatan terhadap pluralisme. Dalam perjalanan waktu, persoalan kebangkitan sentimen keagamaan yang mengarah pada kecenderungan ini telah mewarnai perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Sejarah mencatat bahwa hadirnya gerakan separatis atas dasar sentimen keagamaan telah muncul tak lama setelah Indonesia berdiri. Pada 1949, misalnya, di bawah pimpinan seorang pemuka agama kharismatis Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo berdirilah sebuah organisasi yang kemudian dikenal sebagai Darul Islam (DI) dengan alat perjuangannya Tentara Islam Indonesia (TII). Sebagai gerakan yang dilandasi oleh semangat keagamaan, sekaligus protes terhadap "melembeknya" perlawanan perjuangan mengusir penjajah, DI/TII memiliki tujuan yang jelas, yakni menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara Islam (Daulah Islamiyah) yang

* Penelitian dengan judul tersebut dilaksanakan oleh tim peneliti yang beranggotakan Syafuan Rozi (koordinator), Firman Noor, Luky Sandra Amalia, Muridan S. Widjojo, dan Syamsuddin Haris.

menjalankan seluruh aspek ajaran dan hukum Islam¹⁵³.

Di masa sebelum Orde Baru, ketika persoalan *nation building* baru memasuki tahap formalisasi awal, DI/TII dapat dikatakan merupakan sebuah gerakan paling serius dalam mewujudkan sebuah alternatif bagi negara kebangsaan. Tingkat keseriusannya tidak saja pada level wacana, tapi telah mengalami konkretisasi dalam bentuk penciptaan sebuah pemerintahan dan bahkan perlawanan bersenjata. Nampaknya, belum tuntasnya perdebatan mengenai ideologi negara turut memicu bangkitnya obsesi kelompok-kelompok Islam tertentu untuk mewujudkan sebuah alternatif “kebangsaan” bagi rakyat Indonesia. Sebuah “kebangsaan” yang tidak saja dilandasi oleh semangat senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah, namun juga semangat persaudaraan dalam keagamaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, upaya kelompok-kelompok keagamaan untuk menonjolkan identitas religiusitasnya dalam berpolitik dan memperjuangkan alternatif sistem pemerintahan tidak seutuhnya kandas. Meski secara legal upaya itu telah pupus seiring dengan dibubarkannya Badan Konstituante di tahun 1959, namun pada wilayah ekstra parlementer pada level lokal upaya tersebut tetap ada. Keberadaan DI/TII pimpinan Daud Beureuh, misalnya, praktis masih merupakan ancaman bagi eksistensi keindonesiaan saat itu. Meski kemudian dapat diselesaikan, setidaknya pada tingkat permukaan oleh prajurit TNI pada awal tahun 1960-an, semangat perlawanan terhadap eksistensi “negara sekuler” di Tanah Rencong tidak serta merta pupus.

Memasuki era Orde Baru, sentimen identitas keagamaan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara relatif dapat ditekan. Meski pada awalnya bersikap bersahabat terhadap kelompok Islam, yang kemudian direspons oleh kalangan Islam dengan sebuah pengharapan yang tinggi,¹⁵⁴ kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa rezim baru ini mewarisi pandangan yang

sama dengan rezim pendahulunya, terutama manakala berbicara soal peran politik kelompok keagamaan pada umumnya dan kelompok Islam pada khususnya. Keduanya menaruh kecurigaan yang mendalam terhadap kelompok ini. Khusus untuk Orde Baru, ketidakpercayaan itu terkait pula dengan sikap reaktif umat Islam terhadap modernisasi yang kerap disebut oleh umat Islam sebagai *westernization* (pembabatan).¹⁵⁵

Kecenderungan kebijakan diskriminatif Orde Baru terhadap umat Islam dan kooptasi yang ketat terhadap umat yang lain telah secara tidak langsung turut melestarikan semangat identitas keagamaan. Hal ini belakangan dicerminkan dengan keberadaan kelompok-kelompok keagamaan bawah tanah. Kondisi ini menjadi sinyalemen bahwa tanpa adanya kemauan untuk membuka dialog yang argumentatif dan sehat, Rezim Orde Baru justru turut membidani dan memelihara cara pandang eksklusif dari kelompok-kelompok tersebut. Sikap keras dan tangan besi mungkin telah menyebabkan beberapa kalangan “Islam garis keras” menyingkir hingga bahkan ke luar negeri, namun cara tersebut tidak mampu memusnahkan semangat mereka untuk tetap meyakini ajarannya hingga berakhirnya Orde Baru di tahun 1998.

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari praktik opresif dan kooptatif Orde Baru itu, beberapa kalangan kemudian menghubungkannya dengan fenomena kebangkitan sentimen keagamaan, terutama kalangan Islam, di era reformasi. Era reformasi memang kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan kehidupan keagamaan, yang tidak saja melingkupi wilayah kultural (non-politik), namun pula pada wilayah politik. Dalam konteks wilayah kultural, misalnya, dapat terlihat dengan maraknya pemakaian atribut dan pelaksanaan aktivitas keagamaan, baik pada level lokal maupun nasional. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan semakin afirmatifnya masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan, dan bermuara pada gerakan semacam Tarbiyah, HTI, dan MMI.

¹⁵³ Kajian komprehensif mengenai DI/TII lihat Cornelis van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).

¹⁵⁴ Lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

¹⁵⁵ Mengenai perspektif Orde Baru terhadap Islam di masa awal pemerintahannya lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003).

Politik Identitas dan Ragam Ekspresi Perjuangan

Bangkitnya sentimen identitas keagamaan dalam beragam ekspresinya, termasuk dengan hadirnya kelompok-kelompok keagamaan HTI, Tarbiyah, MMI, di Indonesia pasca-Soeharto merupakan fenomena kongkret terkait munculnya kesadaran dan gerakan politik baru yang menunjukkan sebuah sikap kritis terhadap keindonesiaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kehadirannya jelas tidak monolitik. Hal-hal seperti menguatnya interpretasi keagamaan yang berkecenderungan puritan dan tekstual, makin terbukanya Indonesia dan masuknya arus deras globalisasi yang kian memudahkan masuknya ide-ide keagamaan yang bersifat trans-nasional.

Selanjutnya, menguatnya kesadaran dan obsesi pencarian model alternatif bagi “pemerintahan sekuler”, kebijakan politik Orde Baru yang represif terhadap kalangan Islam tertentu cenderung turut melestarikan pandangan keagamaan yang eksklusif, ataupun adanya peluang demokratisasi yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menumbuhkan ide dan melakukan pergerakan. Secara hipotetik telah menjadi faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan dalam melihat berkembangnya semangat menonjolkan identitas keagamaan.

Namun demikian, semua hal itu harus tetap dilihat dan diuji secara jernih. Hal ini agar dapat terungkap akar-akar penyebab sekaligus upaya pemecahannya secara obyektif. Suatu hal yang pasti, gesekan akan makna keindonesiaan, yang mengisyaratkan sebuah toleransi, persamaan, dan penghargaan terhadap pluralisme, dengan upaya-upaya pencarian model negara alternatif yang diusung oleh kalangan pendukung khilafah Islamiyah, yang berangkat dari sentimen keagamaan, merupakan sebuah fenomena yang berpotensi terjadi.

Terkait dengan hal ini, sejauh mana nilai-nilai keagamaan itu hendak diusung oleh ormas-ormas Islam kontemporer yang berkomitmen dalam penegakan sistem Khilafah Islamiyah (Tarbiyah, HTI, MMI) dan seberapa besar komitmen tersebut akan memberikan dampak pada keindonesiaan merupakan pertanyaan umum kajian topik penelitian ini. Sehubungan dengan itu pertanyaan spesifik yang dibangun antara lain adalah (i)

Hal apa saja yang melatarbelakangi kehadiran (ganeologi) gerakan Ormas Tarbiyah, HTI, MMI di saat Indonesia memasuki era keterbukaan dan demokratisasi? (ii) Apa yang menjadi landasan pemikiran kelompok ini untuk meyakini Khilafah Islamiyah sebagai sebuah alternatif dan hingga tahap mana implementasi itu ingin diwujudkan? (iii) Bagaimanakah pandangan mereka tentang keberadaan negara bangsa semacam Indonesia? (iv) Strategi dan langkah apa saja yang mereka tempuh untuk mewujudkannya? (v) Seberapa besar ide dan gerakan kelompok ini sejatinya “berhadapan” dengan hakikat keindonesiaan?

Secara umum artikel ini bertujuan memberikan sumbangan kajian mengenai fenomena kebangkitan sentimen keagamaan dalam bingkai nasionalisme melalui perspektif kajian ormas Islam kontemporer dalam hal ini kalangan pendukung Khilafah Islamiyah, baik secara implisit dan eksplisit.

Kajian politik identitas ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman tentang keberadaan kelompok-kelompok yang meyakini konsep Khilafah Islamiyah dan menjadi bagian dari alternatif pemikiran dalam memformat bangun keindonesiaan saat ini dan di kemudian hari. Adapun tujuan khusus studi ini bermaksud menganalisis dan memberikan pemetaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan kelompok-kelompok tersebut. Juga berupaya memahami dan melakukan pemetaan mengenai cara pandang keagamaan dan politik kelompok-kelompok tersebut mengenai kekhilafahan dan eksistensi keindonesiaan.

Tipologi Teori: Pemikiran Politik

Saat ini kajian mengenai nasionalisme tidak lagi hanya semata diarahkan kepada pembahasan mengenai hubungan antar negara dalam relasi dominasi dan subordinasi, melainkan telah diturunkan pada level negara-bangsa itu sendiri.¹⁵⁶ Dalam kajian ini, membahas nasionalisme berarti mengkaji semacam tantangan

¹⁵⁶ Mochammad Nurkhoiron, “Agama dan Kebudayaan: Menjelajah Isu Minoritas dan Multikulturalisme di Indonesia” dalam Hikmat Budiman, (Ed.), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2007), hlm. 32. Lihat juga Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).

internal yang dialami oleh negara-bangsa dari kelompok-kelompok primordial yang ada di dalamnya. Dalam konteks Indonesia kontemporer “tantangan” tersebut termasuk yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, yang menawarkan sebetulnya ide dan gerakan yang cenderung eksklusif dalam bingkai sentimen keagamaan.

Keindonesiaan itu sendiri mensyaratkan kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan, di mana semangat kemanusiaan menjadi landasan yang dikaitkan secara asasi dengan nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan. Dengan batasan ini terlihat sebuah peluang kajian dalam melihat keberadaan nasionalisme atau keindonesiaan terutama dikaitkan dengan sebuah situasi di mana faktor kerelaan dan kesadaran untuk bersatu dalam sebuah nasion merupakan sesuatu yang utama.

Dalam hal membicarakan kebangkitan sentimen keagamaan dalam bingkai negara-bangsa tidak dapat dipisahkan dari persoalan interpretasi nilai-nilai keagamaan. Relevansi faktor ideologis, terutama terkait dengan pemahaman seberapa jauh aplikasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya diwujudkan, menjadi penting karena merupakan salah satu faktor penopang keyakinan menegakkan nilai-nilai agama secara lebih komprehensif. Dalam hal ini terdapat kalangan yang meyakini bahwa relevansi agama dalam politik adalah mutlak mengingat sifat agama (Islam) sebagai pegangan hidup komprehensif yang mengatur soal-soal di luar masalah privat.¹⁵⁷

Intepretasi agama semacam itu sejalan dengan tipologi pertama dari tiga tipologi pemikiran Islam Munawir Sjadzali, yakni *Pertama*, adalah kelompok yang menyatakan bahwa Islam

¹⁵⁷ Lihat Syafuan Rozi Soebhan, “Membentang Hakekat Keagamaan dalam Keindonesiaan”, dalam Firman Noor, (Ed.), *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, LIPI, 2007). Mengenai istilah “Islam Formal” lihat misalnya M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 143–184. Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1994). Zifirdaus Adnan, “Islamic Religion: Yes, Islamic Ideology: No. Islam and State Indonesia”, in Arief Budiman, (Ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, (Victoria: Monash University, 1990).

merupakan agama yang sempurna, yang lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki hubungan dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, adalah aliran jalan tengah, yang selain menolak pendapat bahwa Islam suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan, aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam merupakan agama seperti dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini meyakini memang dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, namun demikian Islam mengandung seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁵⁸

Diasumsikan bahwa mereka yang termasuk kelompok pertama, yang kerap dianggap sebagai kalangan “formalis”, akan cenderung mendukung tegaknya Khilafah Islamiyah. Cara pandang keislaman sedemikian di era reformasi saat ini cenderung muncul kembali ketimbang semakin memudar.

Selain persoalan interpretasi, secara internal, eksistensi kelompok-kelompok pendukung Khilafah Islamiyah pada umumnya muncul sebagai reaksi pada dua hal: *pertama*, kondisi umat Islam yang mengalami keterbelakangan dan terus menerus didominasi oleh Barat, terutama akibat keacuhan kalangan pemimpin agama tradisional yang cenderung melakukan eskapisme dan berfikir status-quo. *Kedua*, sebuah kenyataan bahwa situasi ini didukung oleh keberadaan elemen pro-Barat pada masyarakat Islam itu sendiri, terutama oleh mereka yang disebut sebagai kelompok Islam modernis. Kedua hal ini berujung pada degradasi kehidupan umat Islam, baik secara duniawi maupun secara spiritual. Dalam konteks duniawi hal ini ditunjukkan dengan adanya kemiskinan, korupsi, stagnasi intelektual, politik yang tidak stabil, dan peradaban yang menurun.

Adapun dalam hal spiritual ditandai dengan adanya penerimaan nilai-nilai di luar Islam seperti sekulerisme, naturalisme, dan westernisasi, yang dicampur dengan nilai-nilai Islam dan ketidak-adanya idealisme untuk menerapkan

¹⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1–2.

nilai-nilai Islam. Untuk alasan ini, ambisi terbesar dari kelompok ini adalah mengembalikan Islam secara total dalam cara berpikir dan cara hidup, dan juga membuat Islam sebagai alternatif untuk merespons perubahan era saat ini.¹⁵⁹

Penghampiran dan Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah model penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur, baik buku, makalah, jurnal, surat kabar, hasil wawancara dan majalah yang ditulis atau diproduksi oleh penulis atau institusi yang mewakili ormas, maupun tulisan resmi ormas tersebut (*official documents*); juga brosur atau selebaran maupun berbagai literatur yang ditulis oleh pemerhati atau pengamat ormas tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang terkait dengan permasalahan dan tetap berpedoman pada kerangka teori yang telah dikemukakan.

Perlu diketengahkan di sini, dipilihnya HTI, Gerakan Tarbiyah, dan MMI sebagai representasi (atau studi kasus) dari kelompok sejenis disebabkan karena ketiganya relatif telah mewakili eksistensi kalangan pendukung Khilafah Islamiyah dan mewakili “aliran” di dalam kalangan ini di seluruh Indonesia. Tidak itu saja, gerakan dan aktivitas maupun sikap dan pandangan mereka cukup jelas, setidaknya terdeteksi, mengenai persoalan yang terkait dengan Khilafah Islamiyah di awal reformasi.

Hal lain yang cukup menarik adalah ketiganya memiliki keterkaitan erat dengan jaringan trans-nasional, baik langsung maupun tidak.

¹⁵⁹ Beverly Milton-Edwards, *Islamic Fundamentalism since 1945*, (New York: Routledge, 2005); Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation*, (Chicago: University of Chicago Press); hlm. 162. R. Hrair Dekmejian, “Islamic Revival: Catalyst, Categories, and Consequences” dalam Shireen T. Hunter, (Ed.), *The Politics of Islamic Revivalism*, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 1988); Bruce B. Lawrence, *Defenders of God*, (New York: Harper and Row Publishers, 1989); Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought: the Response of the Shi'i and Suni Muslim to the Twentieth Century*, (London: McMillan Press, 1982), hlm. 8; Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam Bahtiar Effendy and Hendro Prasetyo, (Eds.), *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998).

Lebih dari itu, kajian atas ketiganya setidaknya dapat memperlihatkan bahwa keradikalan dalam bersikap dan memperjuangan keyakinan tidak identik dengan sudut pandangan kalangan ini. Di samping itu, keterbatasan dana dan SDM menyebabkan penelitian ini tidak dapat mengeksplorasi lebih lanjut kelompok lain yang sejalan dengan ketiganya.

Gradasi Spektrum Gerakan HTI, Tarbiyah, MMI

Pada level masyarakat, ekspresi kebangkitan keagamaan di Indonesia pasca-Soeharto dapat terdeteksi salah satunya dengan bermunculannya kelompok-kelompok yang mengusung ide penerapan pelaksanaan hukum Islam atau Syariah Islam secara lebih komprehensif. Kelompok-kelompok ini tidak segan untuk menunjukkan simbol-simbol keagamaan dan mengklaim sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan secara lebih menyeluruh. Kelompok ini berupaya meretas jalan bagi terciptanya sebuah tatanan sosial dan sistem politik alternatif yang berorientasi keagamaan dan bersifat trans-nasional. Dalam konteks kelompok-kelompok Islam munculah organisasi dan gerakan semacam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Tarbiyah, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dengan semangat menganjurkan penegakan Syariah Islam dan sebetulnya pemerintahan atas dasar Islam atau Khilafah Islamiyah.

Kelompok-kelompok tersebut dalam konteks praktis telah menunjukkan eksistensi keberpihakan terhadap tegaknya nilai-nilai keislaman bukan saja pada level individual, melainkan pula pada level masyarakat dan negara. HTI misalnya telah mempromosikan Khilafah Islamiyah dalam berbagai kesempatan sebagai bentuk alternatif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia yang berlaku saat ini. Bagi kalangan ini inti persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia terletak dari tidak tepatnya sistem kehidupan dan juga sistem pemerintahan yang dianut. Menurut HTI, sistem politik sekuler terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan bahkan menimbulkan banyak persoalan baru. Oleh karena itu, sistem Khilafah Islamiyah, yang telah memperlihatkan keunggulan-keunggulannya sepanjang sejarah

pemerintahan Islam terutama di masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, patut dipertimbangkan untuk diterapkan.¹⁶⁰ Dalam berbagai kesempatan baik dalam forum-forum akademis, diskusi publik, rapat akbar, hingga demonstrasi di jalan HTI tidak segan menawarkan konsep Khilafah Islamiyah bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Adapun kelompok Tarbiyah tidak secara terang-terangan menyatakan pentingnya khilafah. Kalangan ini lebih memfokuskan diri pada soal-soal perbaikan individual dan membangun masyarakat Islami serta pemantapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan negara. Meski isu penegakan syariah Islam secara formal dan pendirian khilafah Islamiyah tidak dikedepankan saat ini, bahkan terdapat kesan ingin menonjolkan diri sebagai bagian dari elemen kebangsaan, secara ideologi kalangan inipun mengakui penegakan Islam secara total dalam level negara.¹⁶¹

Adapun MMI sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh beberapa tokoh lintas organisasi di tahun 2000, meyakini bahwa perbaikan kehidupan bangsa hanya dapat dilakukan dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaffah). Hal ini berarti melalui penerapan ajaran-ajaran Islam atau Islamisasi dari level individu, masyarakat, dan negara. Atas dasar itulah Negara Islam atau Khilafah Islamiyah bagi MMI adalah sesuatu konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari bilamana masyarakat ingin menghindari berbagai bentuk kemunduran kualitas hidup melalui penegakan syariah Islam.¹⁶² Dalam menjalankan agendanya tersebut kalangan ini banyak berkecimpung dalam upaya-upaya penegakan Syariah Islam di tingkat lokal melalui cabang-cabang MMI di daerah. Sementara pada level nasional organisasi ini kerap membangun sinergi dengan partai-partai Islam dan mendorong partai-partai itu untuk terus konsisten memperjuangkan kembalinya "Piagam Jakarta".¹⁶³ Berikut ini

¹⁶⁰ Mengenai konsep Khilafah HTI lihat dalam Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, (Jakarta: HTI Press, 2005).

¹⁶¹ Sitaresmi S. Soekanto and Navis M., *Tarbiyah Menjawab Tantangan, Refleksi 20 Tahun Pembaharuan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Robbani Pres, 2002).

¹⁶² Jamhari dan Jajang Jahroni, (Eds.), *Gerakan Salafi Radikal*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 68–69.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 84

ulasan matrik yang dibangun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam konteks keindonesiaan pasca-Soeharto, persoalan kebangkitan kelompok-kelompok keagamaan yang cenderung bersifat kritis terhadap eksistensi negara-bangsa sesungguhnya tidak terlepas dari model pemerintahan masa lampau.¹⁶⁴ Beragam kebijakan yang tidak menyenangkan ini justru pada akhirnya hanya melestarikan sebuah keyakinan kuat akan makna ketertindasan sekaligus menjadi penyuluh bagi ikatan yang lebih kuat di antara kelompok-kelompok itu. "Dendam kolektif" atau sikap negatif akibat trauma kemudian menjadi landasan bagi penguatan visi dan pemeliharaan idealisme yang sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan. Lebih dari itu, dengan berupaya menenggelamkan hakikat keagamaan dengan cara-cara kekerasan, jutsru telah membuat pemikiran, ketokohan dan gerakan kelompok keagamaan menjadi sebuah mitos yang menguatkan keyakinan para pengikutnya.

Di samping sebagai respons dari keberadaan rezim yang represif, eksistensi pemikiran dan organisasi kelompok keagamaan yang berupaya menafikan keberadaan negara-bangsa ditengarai merupakan bagian dari sebuah ide yang mondial dan secara organisatoris kerap saling mendukung. Terkait dengan arus deras pemikiran transnasional, pengaruh pemikiran dan jaringan organisasi global memainkan perannya sendiri. Pengaruh itu sendiri mencakup tidak saja dalam konteks pemikiran namun pula dalam konteks organisasi dan model gerakan.¹⁶⁵ Topangan kelompok global ini pun tidak saja dalam konteks tertib organisasi, namun pula pada soal finansial hingga pelatihan para-militer. Dalam konteks keindonesiaan, peran kalangan global itu telah turut memainkan peran dalam konteks civil society, yang memang

¹⁶⁴ Azzumardi Azra, "Fundamentalisme Islam, Survey Historis dan Doktrinal", *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996). Jamhari and Jajang Jahroni, (Eds.), *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). Greg Fealy dan Aldo Borgu, *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*, (Canberra: ASPI, 2005).

¹⁶⁵ Mengenai pengaruh organisasi internasional dalam gerakan Islam di Inonesia era kontemporer lihat misalnya Anthony Bubalo and Greg Fealy, *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*, (Alexandria: Lowy Institute for International Politecy, 2005).

menjadi media yang subur bagi berkembangnya banyak ide dan pengelompokan masyarakat yang mandiri.¹⁶⁶

Sementara itu, dalam kajian mengenai bangkitnya semangat keagamaan di era kontemporer, beberapa pengamat mengindikasikan perasaan tidak aman (*insecure*) terhadap keberadaan negara-bangsa, sebagai salah satu faktor penyebab munculnya “perlawanan” terhadap eksistensi negara-bangsa.¹⁶⁷ Secara spesifik menurut Juergensmeyer kebangkitan primordial keagamaan yang kemudian menantang eksistensi negara-bangsa (yang dilandasi oleh nilai-nilai sekuler) disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, bahwa negara-bangsa walau bagaimanapun dianggap sebagai produk Barat. Bagi kalangan religius tertentu, terutama di negara dunia ketiga, eksistensi negara-bangsa dipandang sebagai bagian dari *ghazwul fikri*, peracunan Barat atas eksistensi mereka (*wes-toxification*).

Kedua, negara-bangsa dengan semangat sekuler dipandang sebagai anti agama. Dalam format ini munculah rasa tidak nyaman kelompok religius atas keberadaan sebuah institusi besar yang pada hakikatnya tidak ditujukan untuk memajukan kehidupan beragama, bahkan menentang berkembangnya nilai-nilai keagamaan. Padahal bagi kalangan beragama di dunia ketiga persoalan agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri sehingga pengebirian kehidupan beragama sejatinya sama dengan penghapusan identitas bangsa itu sendiri.

Ketiga, yang menarik adalah bahwa kalangan religius ini meyakini adanya konspirasi global di balik keberadaan negara-bangsa. Konspirasi itu berupa upaya menyatukan dunia dengan bentuk pemerintahan yang sama untuk seluruh umat manusia. Bagi kalangan keagamaan yang berpandangan ekstrem, negara-bangsa yang sekuler memiliki kecenderungan universalis, yang jika dibiarkan justru dapat mengancam identitas dan kedaulatan warga dunia di masing-masing negara yang berkarakter khas dan berbeda. Dengan ke-

tiga alasan itu menurut Juergensmeyer tumbuh dan berkembanglah wacana yang menentang eksistensi negara-bangsa.¹⁶⁸

Lebih dari itu, kelompok-kelompok religius seperti gerakan HTI menjadikan fenomena kebangkitan agama sebagai momentum memberikan alternatif model pemerintahan dan solusi bagi kemanusiaan.¹⁶⁹ Kalangan ini ingin membuktikan bahwa keberadaan mereka dapat melahirkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih manusiawi dan bermoral berlandaskan nilai-nilai luhur keagamaan. Ada kecenderungan sejatinya bagi mereka rezim sekuler yang menopang eksistensi negara-bangsa tidak lebih dari rezim korup yang tidak cakap dalam memerintah.

Dalam semangat mewujudkan alternatif perbaikan inilah kalangan religius menemukan relevansinya, terutama dengan melihat kenyataan bahwa pemerintahan sekuler meninggalkan banyak kesenjangan dan pekerjaan rumah lain yang tidak sedikit. Aktualisasi dari pesan itu beragam, mulai dari usulan untuk mengubah sistem pemerintahan, sampai dengan pembenahan masyarakat melalui program-program konkret, seperti pemberantasan korupsi, perbaikan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam kaitan inilah maka semangat keagamaan kemudian terkait dengan semangat membuat perubahan atau alternatif solusi.

Sementara itu, khilafah Islamiyah dipandang oleh kalangan ini sebagai konsekuensi bagi setiap kalangan yang berkomitmen mendirikan pemerintahan berdasarkan Islam. Sistem Khilafah Islamiyah di masa lampau telah terbukti mampu tidak saja membebaskan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang terorganisasi, namun pula membentuk pribadi yang baik.

¹⁶⁶ Peter Beyer, *Religions in Global Society*, (London: Routledge, 2006), hlm. 62–117.

¹⁶⁷ Richard T. Antoun, *Memahami Fundamentalisme Gerakan Islam, Kristen dan Yahudi*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).

¹⁶⁸ Mark Juergensmeyer, “Nationalism and Religion”, dalam Gerard Delanty and Krishan Kumar (Eds.), *Nations and Nationalism*, (London: Sage Book Publication, 2006), hlm. 183–184.

¹⁶⁹ Ahmad S. Moussalli, *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy and Islamic State*, (Gainesville: University Press of Florida, 1999).

Matrik Spektrum Gradasi Gerakan Tarbiyah, HTI, & MMI

NO	INDIKATOR	HTI	TARBIYAH	MMI
1	Ganealogi/ Asal-usul	<p>- Induknya berdiri pada tahun 1953 di <i>Al-Quds (Baitul Maqdis)</i>, Palestina, Timur Tengah.</p> <p>- Dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (ulama alumni Al-Azhar Mesir, hakim Mahkamah Syariah di Palestina)</p> <p>- Masuk ke Indonesia sbg HTI pada tahun 1980-an. dg merintis dakwah di kampus-kampus besar seperti IPB, UI, ITB, UNPAD.</p> <p>- Tahun 1990-an mulai merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.</p> <p>- Merupakan organisasi politik (<i>Hizb</i>), bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompok.</p>	<p>- Pengaruh gerakan internasional Ikhwanul Muslimun yang dirintis Hasan Al-Banna, demikian terasa pada gerakan ini, baik sebagai guru spiritual maupun pembimbing utama gerakan.</p> <p>- Masa di antara tahun 1982-1983 diyakini sebagai saat ketika gerakan ini mulai berkembang di tanah air.</p> <p>-Diambilnya era awal tahun 1980-an tersebut terutama terkait dengan kehadiran sebuah generasi intelektual atau sarjana yang baru saja pulang dari pendidikan di negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir atau Arab Saudi, pada awal tahun 1980-an.</p> <p>- diawal 1980-an gerakan ini masih bersifat eksklusif di kampus-kampus (<i>mihwar tanzhimi</i>), maka di awal 1990-an gerakan tarbiyah mulai mengeksiksan dirinya dalam masyarakat seperti membentuk lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan komunikasi (<i>mihwar sya'bi</i>), dan pada akhir 1990-an kalangan ini pun muncul dalam wajah politik yang berorientasi pada pembenahan negara (<i>mihwar muasasi</i>), yang di kemudian hari akan mengarah pada pembentukan sistem politik Islam yang lebih komprehensif lagi (<i>mihwar daulah</i>).</p>	<p>-Gerakan ini lahir dalam bentuk pertemuan akbar Kongres Mujahidin I yang dilaksanakan tanggal 5–7 Agustus 2000 di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta. Perhelatan besar yang mengusung tema “Memperjuangkan Penerapan Syariat Islam (<i>Tathbiq al-Syariat</i>) Secara <i>Kaffah</i> (komprehensif) Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Terutama Bidang Pemerintahan, Sehingga Tauhid Menjadi Asas dan Syariat Islam Menjadi Rujukan Tunggal Bagi Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Kenegaraan Secara Nasional Maupun Internasional”.</p> <p>-Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 1.800 peserta, anggota berbagai ormas dan orpol Islam yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia, antara lain Laskar Santri, Laskar Jundullah, Kompi Badr, Brigade Taliban, Komando Mujahidin, dan Partai Keadilan. Tokoh-tokoh Islam yang hadir di antaranya, Abu Bakar Ba’asyir, Deliar Noer, KH. Alawy Muhammad, KH. Ali Yafie, Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah, Abdul Qadir Baraja, Ir. RHA Sjahirul Alim, MSc, Prof. Mansur Suryanegara, Muhammad Thalib, Bardan Kindarto, KH. Asep Maushul, dr. Fuad Amsyari, dan Abu Jibril, termasuk beberapa utusan ormas Islam yang ada di luar negeri.</p> <p>- Nama Majelis Mujahidin Indonesia diambil dari nama acara yang mana organisasi tersebut dibentuk yaitu Kongres Mujahidin I.</p> <p>- Abu Bakar Ba’asyir dan Irfan S. Awwas sebagai tokoh sentral MMI.</p>

2	<p>Posisi terhadap Demokrasi</p>	<p>- Ada alternatif selain demokrasi, yaitu Khilafah Bukan Sistem Diktator. Khilafah adalah sistem politik Islam.</p> <p>- Kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, menentukan benar dan salah, menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia.</p> <p>- Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai Tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka.</p> <p>Kredo demokrasi mengatakan "suara rakyat adalah suara tuhan (<i>vox populei vox dei</i>)". Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran.</p> <p>Ketika sudah didukung suara mayoritas maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar.</p> <p>Pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sama sekali dengan Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang dibangun di atas prinsip demokrasi.</p>	<p>Ideologi gerakan tarbiyah memiliki kecenderungan dualisme atau multitafsir dalam menyikapi masalah-masalah yang terkait dengan demokrasi, kebangsaan, pemilihan umum, hanya sebatas wacana yang bersifat sementara dan terkait dengan strategi dakwah semata.</p> <p>Gerakan Tarbiyah memiliki prinsip tetap (<i>tsawabit</i>) dan prinsip dinamis (<i>mutghayyirat</i>) yang menjadi landasan untuk bersikap fleksibel, moderat dan kompromistis.</p> <p>Gerakan Tarbiyah mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri atas lebih dari satu agama dan meyakini bahwa pluralisme adalah realitas yang tidak terhindarkan.</p> <p>Penghormatan atas pluralisme ditunjukkan dari inisiatif gerakan ini melalui wakil-wakilnya di parlemen untuk mengupayakan dimasukkannya kata "kewajiban menjalankan agama bagi para pemeluk-pemeluknya" dan menolak kembalinya tujuh kata ke dalam konstitusi yang cenderung bersifat eksklusif. Pilihan gerakan tarbiyah atas usulan tersebut dengan pertimbangan bahwa negara ini jelas terdiri atas orang yang beragama dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda.</p>	<p>Piagam Yogyakarta MMI:</p> <p><i>Pertama</i>, wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.</p> <p><i>Kedua</i>, menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat <i>syirik</i> dan <i>nifaq</i> serta melanggar hak-hak asasi manusia.</p> <p><i>Ketiga</i>, membangun satu kesatuan <i>shaff</i> Mujahidin yang kokoh kuat, baik di dalam negeri, regional, maupun internasional (antarbangsa).</p> <p><i>Keempat</i>, Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya imamah (<i>khilafah</i>)/ kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia.</p> <p><i>Kelima</i>, menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan <i>jihad</i> di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai <i>rahmatan lil 'alamin</i>.</p>
---	---	--	--	--

3	<p>Posisi terhadap Khilafah</p>	<p>HT memiliki platform dasar transnasionalisme atau prinsip memperluas jaringan hingga lintas negara-bangsa. Substansi cita-cita politiknya mengupayakan seluruh Dunia Islam berada dalam satu sistem kekuasaan politik bernama khilafah.</p> <p>- <i>Khalifah</i> tidak ditunjuk oleh Allah, tetapi dipilih oleh kaum Muslim, dan memperoleh kekuasaannya melalui akad <i>bal'at</i>.</p> <p>- Sistem <i>Khilafah</i> bukanlah sistem teokrasi. Konstitusinya tidak terbatas pada masalah religi dan moral sehingga mengabaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebijakan luar negeri dan peradilan.</p> <p>- Kemajuan ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup masyarakat adalah tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh <i>Khilafah</i>.</p> <p><i>Khilafah</i> bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lain. Tidak ada satu orang pun dalam sistem <i>Khilafah</i>, bahkan termasuk <i>Khalifah</i>nya sendiri, yang boleh melegislasi hukum yang bersumber dari pikirannya sendiri.</p> <p><i>Khilafah</i> bukanlah negara totaliter. Penahanan dan penyiksaan tanpa melalui proses peradilan adalah hal yang terlarang.</p> <p><i>Khilafah</i> tidak boleh menindas kaum minoritas. Wanita tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua.</p> <p>Islam memberikan hak bagi wanita untuk memiliki kekayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan di masyarakat</p>	<p>Pembentukan pemikiran yang mengarah pada universalisme tatanan politik Islam, di mana eksistensi negara bangsa kerap terabaikan sementara model entitas politik berdasarkan persaudaraan Islam kerap dikedepankan.</p> <p>Ada prinsip sementara (<i>provisional principal</i>) dan utilitarianisme dalam melihat dan "mengupayakan" keberadaan negara-bangsa.</p> <p>Negara-bangsa tidak dilihat sebagai sebuah entitas yang "stagnan" atau final, namun berproses dan dapat mengalami perubahan. Entitas ini bahkan diyakini, manakala situasinya memungkinkan, akan menjadi elemen penunjang bagi sebuah entitas yang lebih besar lagi yakni <i>Khilafah Islamiyah</i>.</p> <p>Sistem khilafah, yang dibayangkan berporos pada ide persaudaraan atas dasar Islam (<i>Ikhwanul muslimin, Islamic brotherhood</i>), merupakan sebuah keyakinan utama yang merupakan alternatif terbaik bagi umatnya.</p> <p>Tegaknya khilafah adalah sebuah proses bertahap. Bertahapan ini terkait dengan masalah tingkat kesiapan dan potensi dukungan dari kalangan umat Islam sendiri untuk kembali menegakkan khilafah Islamiyah.</p> <p>Ada 2 model khalifah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) model pemerintah tunggal di mana semua negara Islam melebur menjadi satu (seperti yang terjadi di masa lalu) 2) Model konfederasi di mana setiap negara Islam berkomitmen untuk menyatukan diri dalam hal-hal tertentu, seperti konstitusi, nilai tukar, dan keamanan, namun di luar hal-hal tersebut dapat mengatur diri sendiri. <p>Gerakan Tarbiyah cenderung melihat bahwa konfederasi lebih memungkinkan saat ini.</p>	<p>- Pengertian <i>khilafah</i> digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw dalam hal sebagai pemimpin <i>ad-dawlah al-islamiyah</i> (Negara Islam).</p> <p>- MMI tidak terlalu mempersoalkan penamaan sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam misalnya <i>Khilafah Islamiyah</i> sebab bagi MMI yang terpenting adalah menegakkan berlakunya syariat Islam secara <i>kaffah</i> apapun bentuknya</p> <p>-Kekuasaan yang diamanatkan kepada <i>khalifah</i> merupakan kekuasaan yang konstitusional, bukan kekuasaan mutlak pererangan.</p> <p>- MMI mempunyai gagasan untuk mendirikan forum musyawarah internasional seperti PBB Islam untuk mewujudkan globalisasi Islam menuju kemajuan Islam yang selama ini cenderung terhambat oleh Dunia Barat.</p> <p>- MMI berpandangan organisasi Islam internasional yang ada yaitu <i>Mu'tamar Alam Islami</i> yang pusatnya berada di Islamabad dan <i>Rabithah Alam Islami</i> yang pusatnya terletak di Makkah serta Organisasi Konferensi Islam (OKI) dinilai kurang maksimal</p>
---	--	--	--	---

4	<p>Orientasi Ideologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hizbuttahrir</i> berarti 'Partai Kemerdekaan' -Membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali <i>Khilafah Islamiyah</i>. -Menyatakan dirinya adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. - Latar belakang berdirinya HT adalah perjuangan untuk kebangkitan Islam lintas bangsa. - Membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Islam mengatur semua aspek kehidupan (komprehensif) di mana arena politik adalah bagiannya. - Perjuangan politik termasuk di dalamnyaantisipasi <i>Ghaw-zul Fikri</i> (Perang Pemikiran) dan Saluran Politik umat Islam. - <i>Pancasila sebagai "Ideologi" Formalitas</i> Pandangan gerakan tarbiyah terhadap Pancasila juga bersifat unik dan cenderung dualisme. Pancasila sebagai produk dinamika politik bangsa & mampu menyatukan semua orang beragama didasarkan pada konsensus nilai-nilai universal. -Namun gerakan tarbiyah tidak meyakini peran Pancasila sebagai ideologi komprehensif yang mampu menggerakkan hati dan pikiran Umat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan Pancasila jelas tidak dapat diposisikan sama dengan Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan eksistensi umat Islam melalui peningkatan citra Islam di masyarakat sebagai agama yang <i>rahmatan lil 'alamin</i> yang artinya Islam mampu membawa manfaat untuk seluruh umat yang ada di alam semesta dan <i>balad-tun thoyyibatun wa robbun ghofur</i> yang mengandung pengertian bahwa Islam menyehatkan umat dan menciptakan perdamaian untuk bangsa Indonesia, tidak hanya untuk orang Islam semata. -MMI tidak mempropagandakan pembentukan "Negara Islam" atau "Negara Islam Indonesia" sebagaimana yang diperjuangkan Kartosuwiryo melalui DI/TII, melainkan MMI mengkampanyekan penegakan syariat Islam di Indonesia. -MMI tidak akan mendesak pemerintah untuk mengubah ideologi negara menjadi ideologi Islam sekaligus mendirikan Negara Islam jika pemerintah sudah bisa menerima berlakunya syariat Islam sebab Islam akan menjamin kebebasan semua umat beragama untuk menjalankan ajaran agama masing-masing
---	----------------------------------	---	--	--

5	<p>Strategi Perjuangan</p>	<p>- HT hadir di Timur Tengah dan Afrika: Mesir, Libya, Sudan, Aljazair. Eropah: Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Australia. menandakannya bersifat lintas bangsa/ Transnasional.</p> <p>- Strategi pertarungan pemikiran (<i>ash shiro'ul fikri</i>) dan perjuangan politiknya (<i>al kifayah siyasi</i>).</p> <p>- Seluruh kegiatan politik itu dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan fisik atau senjata (<i>laa madiyah</i>) sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw; bersifat politik lewat ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.</p> <p>Strategi tiga tahapan (<i>Marhalah</i>) HTI: pembinaan dan pengaderan (<i>Marhalah At Tatsqif</i>), berinteraksi dengan umat (<i>Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah</i>), penerimaan kekuasaan (<i>Marhalah Istilaam Al Hukm</i>)</p>	<p>- Sisi praktis dari sebuah gerakan & mengukur komitmen implementasi keyakinan yang dimilikinya.</p> <p>- pendekatan multidimensi tidak membatasi diri hanya sebagai sebuah gerakan dakwah kultural (non-politik), namun bersedia partisipasi dalam dunia politik, mengelola sumber-sumber kekuasaan dan menggunakan kekuasaan.</p> <p>- Komitmen gerakan tarbiyah adalah untuk membangun individu dan institusi yang dapat menopang perkembangan dan pemikiran gerakan tarbiyah. Perjuangan di dunia pendidikan, penerbitan, sosial, dan ekonomi.</p> <p>Kehadiran dan aktivitas gerakan tarbiyah di banyak lini menunjukkan bahwa "penguasaan" negara atau politik formal bukan menjadi landasan satu-satunya dan yang pertama.</p> <p>Gerakan tarbiyah meyakini bahwa pembenahan pada level kultural (mulai dari individu, keluarga, masyarakat) memainkan peranan yang sama pentingnya dengan perjuangan di level politik formal. Bahkan kematangan dan penguasaan dalam bidang politik dipandang sebagai sebuah <i>by product</i> dari kesiapan kultural.</p>	<p>- MMI merupakan organisasi <i>tansiq</i> (aliansi) yang berdasarkan atas <i>ukhuwwah Islamiyah</i>, akidah, program dan tujuan perjuangan yang sama.</p> <p>- Aliansi personal (<i>tansiqul fardi</i>), aliansi program (<i>tansiqul 'amali</i>), aliansi institusi (<i>tansiqun nidhami</i>)</p> <p>- visi MMI: <i>tathbiqusy syariat</i> (penegakan syariat Islam) diturunkan ke dalam misi menegakkan penerapan syariat Islam melalui gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan <i>tajdid</i>, menyatukan kembali kekuatan dan potensi umat Islam yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu wadah perjuangan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, meliputi lingkup pribadi, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial-kenegaraan.</p> <p>- Formalisasi agama dalam sistem sosial politik Indonesia. MMI tidak menggagas pendirian negara agama, melainkan lebih mementingkan simbolisasi agama dalam negara.</p> <p>- Jika perjuangan menuangkan kembali Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 telah berhasil maka tidak perlu dibentuk negara Islam. Indonesia tetap sebagai Negara Pancasila, seperti sekarang, tetapi telah diperbaiki.</p> <p>- MMI banyak memiliki kesamaan dengan Hizbut Tahrir (HTI), Partai Keadilan dan Dewan Dakwah, merapat pada ormas besar, NU dan Muhammadiyah, terutama di tingkat daerah dan memperoleh dukungan dari beberapa tokohnya terkait penegakan syariat Islam di Indonesia.</p>
---	-----------------------------------	---	--	---

6.	<p>Posisi terhadap Keindonesiaan/ Nasionalisme. Keberagaman dan Kebhinekaan</p>	<p>- HTI berjuang dan berupaya secara bertahap dan jalan damai untuk memerdekakan negeri-negeri kaum muslim di seluruh dunia dari cengkeraman berbagai ideologi, termasuk di dalamnya nasionalisme, yang dianggap "bertentangan" dengan ajaran Islam yang lintas bangsa.</p> <p><i>Manifesto HTI</i> adalah jalan baru untuk masa depan yang lebih baik, sebagai ganti dari jalan lama (yaitu Kapitalisme-sekular) yang sudah gagal dan hanya menimbulkan kehancuran dan kerusakan dalam berbagai bidang.</p> <p>HTI menilai sistem ekonomi yang diterapkan sekarang di Indonesia adalah Kapitalisme, dengan mazhab neo-liberalisme. Ciri-ciri utama: (1) Pengurangan subsidi, seperti subsidi BBM, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat menengah bawah. (2) Privatisasi, yaitu penjualan BUMN kepada asing. (3) Liberalisasi sektor keuangan, industri dan perdagangan; misalnya masuknya retail raksasa semisal <i>Carefour</i> dan <i>Wallmart</i> ke pasar retail Indonesia yang akhirnya menghancurkan pasar tradisional dan usaha kecil dan mikro. HTI menggagas sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dari sistem Kapitalisme-neoliberal yang zalim dan eksploitatif.</p>	<p>-Membumikan doktrin atau "mengindonesiakan" falsafah dasar keislaman merupakan sebuah pilihan bagi gerakan Tarbiyah Keyakinan akan keseluruhan sistem Islam dan perubahan gradual yang disertai dengan keyakinan akan keutamaan khilafah, mendasari sebuah sudut pandangan yang khas berupa "dualisme".</p> <p>- Negara-Bangsa: Sebuah Kesementaraan.</p> <p>- Pancasila sebagai "Ideologi" Formalitas.</p> <p>- Pluralisme sebagai Investasi Strategis.</p> <p>- Pluralisme tetap berada dalam koridor supremasi syariah.</p> <p>Kalangan elit PKS, yang <i>notabene</i> merupakan elit gerakan Tarbiyah, mencoba untuk merubah <i>image</i> partai menjadi lebih inklusif dan nasionalis, namun secara doktrinal persoalan mengenai penciptaan sebuah pemerintahan Islam dalam kerangka universalisme tetap menjadi elemen penting dari gerakan ini.</p> <p>Dalam konteks praktis gerakan ini tidak menimbulkan banyak kontroversi dan nampak kompatibel bagi keindonesiaan. Keindonesiaan secara fundamental menyaratkan toleransi, musyawarah dan penghormatan atas pluralisme.</p>	<p>- Perjuangan MMI hanya difokuskan di wilayah Indonesia saja, tidak sampai ke luar negeri. Oleh karena itu, MMI tidak ada hubungannya dengan Majelis Mujahidin yang ada di negara lain</p> <p>- Pemberlakuan syariat Islam tidak serta merta akan memaksa orang-orang non-Muslim agar masuk Islam. Pemeluk agama lain diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing sebab mereka termasuk ke dalam kategori kafir <i>dhimmi</i>, yaitu orang-orang yang beragama di luar Islam tetapi berada di bawah pemerintahan Islam, sebagaimana yang telah diterapkan pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad. Kaum kafir <i>dhimmi</i> juga tidak akan dikenai hukum syariat tertentu.</p> <p>- MMI punya 4 program unggulan, 1) melakukan amandemen UUD 1945 dan diajukan pada Sidang Umum MPR: usulan perubahan terhadap bentuk dan kedaulatan negara yang berbunyi "kekuasaan tertinggi menetapkan hukum di tangan Allah yang Maha Kuasa". Usulan perubahan tentang kekuasaan pemerintahan negara, "Presiden dan Wapres ialah WNI, laki-laki, sehat jasmani-rohani, Muslim yang taat menjalankan syariat Islam. 2) bidang hukum MMI sudah menyusun KUHP Islami dan menyerahkannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM. 3) Bidang ekonomi, sistem ekonomi Indonesia yang Islami: sumber ekonomi ada dua belas di antaranya zakat, dan waqaf serta tidak ada sistem pajak, 4) bidang politik, MMI mengajukan tata pemerintahan (tata negara) Islami.</p>
----	--	---	--	---

Keterangan: diolah oleh tim peneliti dari berbagai sumber, 2009.

Makna utama sistem Khilafah Islamiyah itu sendiri terkait dengan komitmen menjalankan kesetiaan berdasarkan semangat persaudaraan Islam di mana ajaran-ajaran Islam merupakan konstitusi dasarnya. Doktrin ini diarahkan pada orientasi politik yang memiliki cakupan universal dan tanpa batas nasionalistik, di mana masyarakat Islam disatukan dan diikat hanya dengan keyakinan. Sementara itu, diskusi tentang khalifah dalam dunia Islam saat ini mencakup dua pandangan utama. Pandangan pertama mengemukakan fungsi dan substansi khalifah. Bagi kalangan ini, pendirian khalifah dalam dunia modern merupakan refleksi nilai-nilai Islam universal dalam wilayah administrasi yang terbatas. Dalam pandangan ini, bentuk, cakupan, dan wilayah tertentu pemerintah bukanlah faktor penentu bagi keberadaannya. Sementara pandangan kedua mengemukakan pentingnya wilayah tertentu bagi khalifah. Bagi kalangan ini, khalifah berkaitan dengan keberadaan wilayah Muslim, di mana ada kepemimpinan tunggal untuk mengontrol wilayah geografis berdasarkan persamaan agama.¹⁷⁰

Dalam perkembangannya kemudian, sebagaimana arus agama dan politik lainnya, kelompok semacam ini yang kemudian kerap disebut sebagai kalangan fundamentalis atau neo-revivalis memiliki banyak varian dan model dalam pelaksanaannya. Beberapa ahli berargumen bahwa fundamentalis umumnya berevolusi ke dalam banyak bentuk, perkembangan ini sebenarnya menggambarkan keberadaan dari perbedaan tingkat wacana dan juga konteks tindakan dan strategi politik dari kelompok ini. Dengan kenyataan ini kalangan pendukung khilafah Islamiyah bukanlah sebuah kalangan monolitik.

Dalam hubungan ini, kerangka analisis Martin E. Marty dan R. Scott Appleby menyatakan bahwa cara dan sarana yang digunakan oleh kaum fundamentalis dalam mendapatkan kekuasaan dan menguasai sebuah negara amatlah beragam, “mencakup spektrum dari kalangan radikal hingga kelompok yang bersifat

akomodasionis”.¹⁷¹ Sejalan dengan kesimpulan ini, Bassam Tibi¹⁷² mengakui bahwa kaum fundamentalis tidak selalu fanatik di mana kesediaan berdialog kerap dikedepankan oleh beberapa kelompok penganut pandangan ini. Ini dilakukan oleh gerakan Tarbiyah, dan cenderung agak kurang oleh gerakan HTI dan MMI. Atas dasar itulah penelitian ini melihat adanya potensi perbedaan dan gradasi komitmen, terutama dalam konteks implementasi strategi perjuangan, di antara ormas-ormas pendukung khilafah Islamiyah di Indonesia.

Penutup: Tujuan Boleh Sama, Cara Berbeda

Keberagamaan merupakan salah satu elemen utama dari fondasi bangsa ini, namun kecenderungan yang mengarah eksklusivisme, jelas berpotensi meluruhkan bangun keindonesiaan, yang bercorak Bhineka Tunggal Ika. Adanya toleransi dan penghormatan terhadap berbagai aliran politik adalah keniscayaan dalam keindonesiaan. Namun agak sulit untuk membayangkan Indonesia berubah menjadi negara berdasarkan suatu agama, walaupun gerakan khilafah Islamiyah berupaya mewujudkannya baik dalam panggung dakwah, dunia pendidikan, partai politik atau gerakan sosial radikal yang pelan namun membekas.

Secara genealogis atau asal-usul, gerakan Tarbiyah, HTI, MMI memiliki akar dan jaringan dengan gerakan Islam antarbangsa. Namun demikian membumikan doktrin atau “mengindonesiakan” falsafah dasar keislaman merupakan sebuah pilihan bagi gerakan Tarbiyah. HTI menawarkan sistem ekonomi syariah untuk membendung dampak buruk kapitalisme dan neo-liberalisme di Indonesia. MMI menawarkan empat program unggulan untuk membenahi Indonesia. Gerakan tersebut memiliki pola berfikir global dan bertindak lokal.

Gerakan HTI membuat ulasan soal Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam. Bagi HTI Indonesia adalah titik awal tegaknya

¹⁷⁰ Aay M. Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 246.

¹⁷¹ Martin E. Marty and Scott Appleby, (Eds.), *Fundamentalism and State Comprehended*, (Chicago: The UCP, 1991).

¹⁷² Bassam Tibi, “Kaum Fundamentalis Jadikan Islam sebagai Ideologi Politik, dalam *Tashwirul Afkar*, No. 13/2002, hlm.119.

khilafah. Semua persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia, berpangkal pada tidak adanya kedaulatan asy-Syari'. Dengan kata lain, tidak diterapkannya sistem Islam di tengah-tengah masyarakat. Masalah utama ini kemudian memicu terjadinya berbagai persoalan ikutan, seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, kerusakan moral, kezaliman, ketidakadilan, disintegrasi dan penjajahan dalam segala bentuknya

Gerakan tarbiyah bergerak bak pendulum. Di satu sisi, eksistensinya merupakan bagian dari perkembangan sejarah anak bangsa yang gelisah dan berupaya menjawab berbagai soal di sekitarnya. Di sisi lain, gerakan ini menemukan jawaban dalam pola pikir dan gerakan transnasional. Dalam kondisi ini pilihan-pilihan untuk berkembang sejalan dengan keyakinan ideologis berkelindan dengan kenyataan-kenyataan empiris yang dihadapi. Dalam situasi seperti ini pilihan-pilihan universalistik harus disejajarkan dengan konteks nasionalistik.

Gerakan MMI cenderung menilai masyarakat dan pemerintah Indonesia telah menerapkan syariat Islam namun belum menyeluruh. Selama ini umat Islam di Indonesia bebas menjalankan ajaran agamanya, seperti melaksanakan shalat berjamaah, menunaikan zakat, dan pergi Haji ke Tanah Suci Makkah. Selain itu, pemerintah menyelenggarakan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah umat. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan mengenai nikah-talak-cerai-rujuk (NTCR) yang merujuk pada ajaran Islam. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan penyempurnaan dalam menerapkan syariat Islam, termasuk menerapkan hukum pidana Islam sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari persoalan moral dan akidah

Dari kajian teoritis dan olah data lewat penelitian ini dapat dilihat kecenderungan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya semangat menonjolkan identitas primordial, termasuk dalam konteks keagamaan, di Indonesia pada era demokratisasi saat ini, khususnya tentang ide penerapan khilafah Islamiyah oleh beberapa ormas Islam kontemporer.

Faktor-faktor tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terhubung dengan persoalan: *pertama*, persepsi tentang posisi Islam dalam kehidupan politik. *Kedua*, kritik atas kemunduran kondisi umat Islam yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Ketiga, model pemerintahan represif masa lampau yang menghadirkan trauma dan obsesi yang eksklusif. Keempat, peluang demokratisasi yang memungkinkan berkembangnya beragam ide termasuk hadirnya berbagai macam ide keagamaan yang bersifat transnasional. Kehadiran gerakan yang bercita-cita membangun khilafah, menjadi cermin dan pengkritik yang baik terhadap kegagalan atau kebelumberhasilan negara nasional, negara kesejahteraan atau negara kesatuan.

Daftar Pustaka

- Anan, Zifirdaus. 1990. "Islamic Religion: Yes, Islamic Ideology: No. Islamand State Indonesia", in Arief Budiman. (Ed.). *State and Civil Society in Indonesia*. Victoria: Monash University.
- Aldo, Borgu dan Greg Fealy. 2005. *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*. Canberra: ASPI.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. 1994. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Antoun, Richard T. 2003. *Memahami Fundamentalisme Gerakan Islam, Kristen dan Yahudi*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Anwar, M. Syafi'i. 2003. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azzyumardi. 1996. "Fundamentalisme Islam, Survey Historis dan Doktrinal". *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Basalim, Umar. 2002. *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beyer, Peter. 2006. *Religions in Global Society*. London: Routledge.
- Bubalo, Anthony and Greg Fealy. 2005. *Joining the Caravan? The Middle East, Islamism and Indonesia*. Alexandria: Lowy Institute for International Polity.

- Dekmejian, R. Hrair. 1988. "Islamic Revival: Catalyst, Categories, and Consequences". Dalam Shireen T. Hunter (Ed.). *The Politics of Islamic Revivalism*. Washington: Center for Strategic and International Studies.
- Effendy, Bahtiar. 2003. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Enayat, Hamid. 1982. *Modern Islamic Political Thought: the Response of the Shi'i and Suni Muslim to the Twentieth Century*. London: Mc-Millan Press.
- Feith, Herbert dan Lance Castels (Eds.). 1970. *Indonesian Political Thinking: 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Furkon, Aay Muhammad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer*. Bandung: Teraju.
- Hizbut Tahrir. 2005. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Jakarta: HTI Press.
- Jamhari and Jajang Jahroni (Eds.). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juergensmeyer, Mark. 2006. "Nationalism and Religion". Dalam Gerard Delanty and Krishan Kumar (Eds.). *Nations and Nationalism*. London: Sage Book Publication.
- Kmylicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press.
- Lawrence, Bruce B. 1989. *Defenders of God*. New York: Harper and Row Publishers.
- Maarif, Ahmad S. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Marty, Martin E and Scott Appleby (Eds.). *Fundamentalism and State Comprehended*. Chicago: The UCP.
- Milton-Edwards, Beverly. 2005. *Islamic Fundamentalism since 1945*. New York: Routledge.
- Moussalli, Ahmad S. 1999. *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy and Islamic State*. Gainesville: University Press of Florida.
- Nasution, Adnan Buyung. 1992. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of The Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurkhoiron, Mochammad. 2007. "Agama dan Kebudayaan: Menjelajah Isu Minoritas dan Multikulturalisme di Indonesia". Dalam Hikmat Budiman (Ed.). *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Pusat Studi dan Pengembangan Informasi. 1998. *Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Fakta dan Data*. Jakarta: GIP.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Siswoyo, P. Bambang. 1989. *Peristiwa Lampung dan Gerakan Sempalan Islam*. Jakarta: UD Mayasari.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soebhan, Syafuan Rozi. 2007. "Membentang Hakekat Kegamaan dalam Keindonesiaan", dalam Firman Noor (Ed.). *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, LIPI.
- Soekanto, Sitaresmi S. and Navis M. 2002. *Tarbiyah Menjawab Tantangan, Refleksi 20 Tahun Pembaharuan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Robbani Press.
- Taher, Tarmizi. 1998. "Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam". Dalam Bahtiar Effendy and Hendro Prasetyo (Eds.). *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tibi, Bassam. "Kaum Fundamentalisme Jadikan Islam sebagai Ideologi Politik". Dalam *Tashwirul Afkar*, No. 13/2002, hlm. 119.
- Van Dijk, Cornelis. 1981. *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.